

KARAKTERISTIK, ASPIRASI, DAN MEDIA INFORMASI DALAM MUSRENBANG DESA/KELURAHAN DI KOTA BANJAR JAWA BARAT

Adhi Iman Sulaiman¹, Djuara P. Lubis², Djoko Susanto³, Ninuk Purnaningsih⁴

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman

Jl. Prof. Bunyamin No. 993, Purwokerto, Jawa Tengah

^{2, 3, 4} Departemen Sain Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor
Kampus IPB Darmaga Bogor, Jawa Barat

No. Telp./HP: ¹ 081313220202, ² 08128194904, ³ 08121100728, ⁴ 081317095618

E-mail: ¹ adhi_iman@yahoo.com, ² djuaralubis@gmail.com, ³ kmpipb@yahoo.com, ⁴ npurnaningsih@gmail.com

Naskah diterima tanggal 15 Februari 2016, direvisi tanggal 6 Juni 2016, disetujui tanggal 20 Juni 2016

CHARACTERISTIC, ASPIRATIONS, INFORMATION MEDIA IN DEVELOPMENT PLANNING CONSULTATION FORUMS AT THE BANJAR CITY, WEST JAVA PROVINCE

Abstract. *Demands and challenges in the era of democratization and decentralization have been a paradigm to change centralized development to participatory which gave more opportunities to aspirations of the people at local level. This is realized through a communication forum between stakeholders in the development planning consultation forum (Musrenbang). This study was aimed to describe and analyze the characteristics of stakeholder, aspirations and access to information media in Development Planning Consultation Forum (Musrenbang) at the village/urban village. This study used sequential mixed methods through the first and third stages of the research process using the descriptive qualitative method. Qualitative data were collected through direct observation, analysis of documents, and interviews, the informants had been chosen through purposive sampling, as well as the use of interactive analysis and SWOT analysis. The second stage uses the descriptive quantitative method. Quantitative data were collected through questionnaires and samples were taken gradually by using cluster sampling, Slovin formula, and stratified sampling and used descriptive analysis. The results showed the stakeholders have old age category and fairly low educational status, but they have a lot of experience in organizing and participating in Musrenbang and also have strong motive to participation in Musrenbang. The aspirations of the Musrenbang sub-villages/suburban villages result have important category and stakeholders have the intensity of information media access through the letter from the local governance.*

Keywords: *characteristics of stakeholder, aspirations, information media, consultation forum*

Abstrak. Tuntutan dan tantangan di era demokratisasi dan otonomi daerah telah terjadi perubahan paradigma pembangunan dari sentralistik menjadi partisipatif yang memberikan kesempatan lebih luas dan terbuka bagi aspirasi masyarakat di tingkat lokal. Hal tersebut diwujudkan melalui forum komunikasi antar *stakeholder* dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis karakteristik, aspirasi, dan akses media informasi dalam Musrenbang desa/kelurahan. Penelitian menggunakan metode campuran sekuensial (*sequential mixed methods*) dengan tahap pertama dan ketiga proses penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data kualitatif melalui observasi langsung, analisis dokumentasi dan wawancara dengan pemilihan

informan secara *purposive sampling* serta menggunakan analisis interaktif dan analisis SWOT. Tahap kedua menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Data kuantitatif melalui kuesioner dengan pengambilan sampel secara bertahap yaitu sampling klaster, rumus Slovin dan sampel berstrata serta menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan karakteristik *stakeholder* memiliki kategori usia tua, tingkat pendidikan rendah, tetapi sangat berpengalaman berorganisasi dan mengikuti Musrenbang serta motif yang kuat untuk mengikuti Musrenbang desa/kelurahan. Aspirasi paling penting adalah hasil Musrenbang desa/kelurahan dan *stakeholder* memiliki intensitas tinggi pada media informasi melalui surat resmi dari pemerintahan desa/kelurahan.

Kata kunci: karakteristik *stakeholder*, aspirasi, media informasi, musyawarah

PENDAHULUAN

Proses pembangunan melalui tahapan penyusunan rancangan awal rencana pembangunan yang menyeluruh dan terukur serta yang bersifat teknokratik yaitu ditentukan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang bersifat *top-down*. Tahap berikutnya kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang untuk dua puluh lima tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk lima tahun, Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk satu tahun yang bersifat *bottom-up* mulai dari tingkat desa dan kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota serta provinsi, sampai akhirnya ke tingkat nasional. Hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Daerah, yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, bahwa Musrenbang adalah forum antar *stakeholder* dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan daerah.

Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang sistematis dan komprehensif tersebut, memerlukan

komunikasi partisipatif yang diperankan *stakeholder* untuk menyinergikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan masyarakat di tingkat desa dengan pemerintah lokal dan nasional. Menurut Mascarenhas *et al.* (2012) kebijakan pembangunan harus dapat mengartikulasikan kebijakan nasional dan lokal serta manajemen yang tepat untuk sumber daya alam, interkoneksi antar kota, pertumbuhan ekonomi dan identitas budaya. Age *et al.* (2012) menyatakan pembangunan nasional merupakan misi dari semua negara untuk mencapai tujuannya dengan mengawali proses pembangunan dari level *grassroot* yaitu melaksanakan pembangunan di pedesaan.

Pentingnya komunikasi partisipatif pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan hasil pembangunan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sesuai dengan tujuan pembangunan Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, bahwa visi pembangunan nasional menuju tahun 2025 yaitu Indonesia yang mandiri, adil, dan makmur.

Terdapat beberapa permasalahan dalam proses pembangunan dan Musrenbang, berdasarkan beberapa hasil penelitian: (1) Komunikasi partisipatif belum terimplementasi secara baik karena pelibatan pengambilan keputusan didominasi oleh elit desa dan fasilitator, dan tidak terjadi komunikasi timbal balik (dialog) dengan masyarakat, sehingga musyawarah terkesan hanya bersifat pengumuman atau sosialisasi

satu arah (Muchlis, 2009). (2) *Stakeholder* kurang memiliki, bekerjasama secara sukarela dan memberikan informasi (Susanti, 2009). (3) Ketidakselarasan perencanaan dengan program dana anggaran (Koswara, 2010), Musrenbang masih bersifat sentralistik dengan *top-down planning*, ketidakmampuan fasilitator mengakomodasi aspirasi dan hasil usulan kurang berkualitas (Ma'rif *et al.*, 2010). (4) Musrenbang bersifat formal rutin tahunan dan belum dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat (Satries, 2011). (5) Ketidakseimbangan dalam informasi dan kesalahan sasaran informasi, maka akan membawa dampak terbelakainya potensi dari rakyat perdesaan (Age *et al.*, 2012). (6) Pemerintah masih mendominasi dalam Musrenbang (Indrajat *et al.*, 2012). (7) Kelemahan peranan komunikator dari aspek kemampuan komunikasi (Salahuddin, 2012). (8) Perencanaan pembangunan daerah cenderung elitis, usulan dari masyarakat kurang diakomodir dan masyarakat tidak dilibatkan sampai kepengambilan keputusan perencanaan (Supardi, 2013).

Berdasarkan permasalahan hasil penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki perbedaan yaitu memfokuskan kajian pada karakteristik pemangku kepentingan, aspirasi dan media informasi dalam Musrenbang desa/kelurahan. Maka penting untuk meneliti tentang: (1) Karakteristik *stakeholder*, aspirasi dan akses media informasi dalam Musrenbang desa/kelurahan. *Stakeholder* merupakan representasi masyarakat dalam proses pembangunan yang partisipatif mulai dari perencanaan dan pelaksanaan di tingkat lokal yaitu desa/kelurahan. Kesadaran elit politik maupun masyarakat tentang otonomi daerah merupakan hal yang penting untuk membangun representasi kekuasaan bersama yang menjunjung tinggi pluralisme dan menghargai perbedaan di masyarakat (Susanto, 2010). Partisipatif melibatkan warga masyarakat desa dalam segenap proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan hasil-hasilnya (Adisasmita, 2006). Pendekatan partisipasi sangat penting mengingat masyarakat di daerah yang lebih mengetahui dan mampu mengidentifikasi

permasalahan, potensi, dan kebutuhan wilayahnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, bahkan penilaian suatu pembangunan (Purwaningsih, 2008). (2) Aspirasi yang diperjuangkan pemangku kepentingan dalam Musrenbang desa/kelurahan berupa usulan program pembangunan secara partisipatif. Realitas pembangunan yang partisipatif dengan adanya usulan aspirasi mulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dusun/lingkungan dan desa/kelurahan terdapat dalam kegiatan Musrenbang desa/kelurahan. Kaelola (2009) menyatakan aspirasi adalah usulan, keinginan atau kehendak disertai harapan agar bisa tercapai. (3) Media informasi yang tersedia dan dapat diakses akan mendukung terhadap proses Musrenbang supaya dapat diketahui dan menjadi milik bersama baik *stakeholder*, pemerintah desa/kelurahan maupun masyarakat. Satries (2011) menegaskan pemerintah daerah dapat memberikan informasi dan melakukan sosialisasi seluas-luasnya mengenai segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Musrenbang kepada masyarakat secara umum. Informasi dan sosialisasi tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan media.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis karakteristik, aspirasi, media informasi yang diakses *stakeholder* dalam Musrenbang desa/kelurahan di Kota Banjar Provinsi Jawa Barat.

LANDASAN KONSEP

Stakeholder dalam pembangunan dapat berperan sebagai aktor atau pelaku dan agen pembaharu dalam pembangunan, menurut Sumarto (2004) pembangunan sebagai proses interaksi (komunikasi) dan aksi (tindakan) yang terencana untuk lebih menyejahterakan kehidupan, tidak lepas dari peran aktor pembangunan itu sendiri. Aktor pembangunan yang dimaksud adalah para *stakeholder* atau *stakeholder* yang beraspirasi, mengakomodasi, bernegosiasi,

melakukan lobi dan sosialisasi, membuat perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi pembangunan. Mardikanto (2010) juga menyebut pelaku-pelaku pembangunan sebagai *stakeholder*.

Komunikasi untuk pembangunan mensyaratkan ada pelaku pembangunan (*development actors*) yang harus terlibat dalam struktur yang berasal dari masyarakat dalam setiap tingkat proses dari perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan (Buddenhagen dan Baldwin, 2012).

Teori komunikasi yang relevan dengan pembangunan partisipatif adalah model komunikasi konvergen yang menggambarkan adanya hubungan antara komponen utama dalam proses komunikasi. Penelitian ini mengutip atau mengadopsi teori komunikasi konvergensi Rogers dan Kincaid (1981) yang menyebutkan bahwa informasi dan pemahaman bersama (timbal balik) merupakan komponen utama dalam model komunikasi konvergensi. Proses informasi pada level individu yang menyangkut penerimaan, penafsiran, pemahaman, keyakinan atau kepercayaan dan tindakan yang membuat secara potensial, paling tidak suatu informasi baru untuk diproses lebih lanjut. Ketika informasi dibagikan oleh dua atau lebih partisipan, proses informasi akan membawa pada pemahaman bersama (timbal balik), kesepakatan bersama, dan tindakan kolektif.

Menurut Rogers (1985) proses reorientasi yang diperlukan bagi penelitian komunikasi, diharapkan dapat menggunakan kekuatan komunikasi untuk tujuan-tujuan yang lebih manusiawi. Schmeer (1999) menyatakan suatu proses sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi kualitatif dalam menentukan kepentingan siapa yang harus diperhitungkan ketika mengembangkan dan/atau melaksanakan kebijakan atau program. Mulyana (2007) menyatakan komunikasi pembangunan yang harus dikembangkan adalah komunikasi pembangunan yang berorientasi kerakyatan dan humanistik yang menuntut dialog antara pihak-pihak yang punya gagasan

pembangunan dengan subjek pembangunan yaitu masyarakat. Ndraha (2011) berpendapat bahwa jika hendak mencari dan menemukan makna suatu perilaku dan nilai aspirasi dari rakyat, maka harus menggunakan komunikasi dengan pendekatan kualitatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode campuran sekuensial (*sequential mixed methods*) yaitu menggabungkan penemuan-penemuan yang diperoleh mulai dari penelitian kualitatif terlebih dahulu, penelitian kuantitatif ataupun sebaliknya untuk saling melengkapi, memperluas serta mempertajam hasil penelitian (Creswell, 2009; Taddlie and Tashakkori, 2010). Proses penelitian ini dilakukan dengan tiga tahap, yaitu: (1) Menggunakan metode kualitatif deskriptif, membuka akses, proses perizinan, dan melakukan pendekatan untuk menjalin hubungan kepada subjek penelitian (pada tahun 2012-2013). Menentukan lokasi dan identifikasi responden atau informan penelitian (November 2013 sampai Maret 2014). (2) Penelitian kuantitatif deskriptif melalui penyebaran angket antara Agustus-September 2014 kepada responden yang menjadi sampel penelitian yaitu para peserta Musrenbang desa/kelurahan di lokasi penelitian Desa Balokang dan Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar serta Desa Rejasari dan Kelurahan Mekarsari di Kota Banjar Provinsi Jawa Barat. Pengambilan sampel secara bertahap dengan sampel kuota, rumus Slovin dan proporsional random sampling, dari 200 populasi didapatkan 133 responden dengan menggunakan analisis deskriptif. (3) Menggunakan penelitian kualitatif untuk triangulasi data melalui wawancara dengan *purposive sampling* kepada *stakeholder* yang terlibat langsung dalam Musrenbang desa/kelurahan, melakukan pengamatan langsung dan dokumentasi pada Musrenbang desa/kelurahan antara Januari-Maret 2015 dengan analisis interaktif dari Miles dan Huberman (2007) dan analisis SWOT (Rangkuti, 2004; Adisasmita, 2006).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini difokuskan pada Musrenbang di tingkat desa/kelurahan sebagai forum komunikasi *stakeholder* yang mewakili masyarakat di tingkat bawah yaitu untuk membahas dan menyepakati hasil musyawarah tingkat Rukun Warga (RW) dan dusun/lingkungan. Berdasarkan penyebaran kuesioner, identitas pemangku kepentingan sebagai peserta Musrenbang desa/kelurahan dari laki-laki lebih banyak jumlahnya di empat lokasi penelitian sebesar 77,44%, jenis pekerjaan lebih banyak sebagai petani sebesar 35,34% dan wiraswasta sebesar 33,83%. Khusus pada Musrenbang desa/kelurahan terdapat keterwakilan pemangku kepentingan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Stakeholder yang terlibat hadir sebagai peserta Musrenbang desa/kelurahan dapat berupa kelompok, organisasi, dan individu yang memiliki kepentingan/pengaruh dalam proses pengambilan keputusan/pelaksanaan pembangunan. *Stakeholder* yang dimaksud adalah unsur staf pemerintah desa/kelurahan khususnya bidang pemerintahan dan ekonomi pembangunan yang terkadang merangkap sebagai fasilitator.

Proses pembangunan melibatkan peran penting dari pemangku kepentingan (*stakeholder*) baik perorangan maupun kelompok dan organisasi yang secara aktif terlibat dalam kegiatan, terkena dampak positif dan negatif dari hasil pelaksanaan kegiatan (Iqbal, 2007; Nurcholis *et al.*, 2009; Mardikanto, 2010). Berdasarkan hasil penentuan sampel dengan kuota, rumus Slovin dan proporsional random sampling dari jumlah populasi 200 *stakeholder*, maka dihasilkan 133 orang sebagai sampel penelitian untuk mengisi kuesioner penelitian.

Karakteristik *Stakeholder* dalam Musrenbang Desa/Kelurahan

Stakeholder dalam pembangunan dapat berperan sebagai aktor atau pelaku dan agen pembaharu dalam pembangunan, menurut

Sumarto (2004) pembangunan sebagai proses interaksi (komunikasi) dan aksi (tindakan) yang terencana untuk lebih menyejahterakan kehidupan, tidak lepas dari peran aktor pembangunan itu sendiri.

Karakteristik *stakeholder* dalam penelitian ini yaitu usia, pendidikan formal, pengalaman berorganisasi, pengalaman Musrenbang desa/kelurahan, motif mengikuti Musrenbang desa/kelurahan, sebagai disajikan pada tabel 1. Karakteristik *stakeholder* menurut usia umumnya memiliki kategori tua memiliki nilai positif jika dinilai berdasarkan kriteria Bappeda dan BPS (Kota Banjar dalam angka 2013) untuk kategori usia produktif adalah antara 15 sampai dengan 64 tahun, sedangkan usia > 65 tahun sudah masuk kategori usia tidak produktif. Gustina (2007) menyatakan ada kecenderungan bahwa semakin tua usia maka peran dalam jaringan untuk derajat keterhubungan (koneksi) dan derajat integrasi akan semakin intensif. Tingkat kesadarannya untuk berpartisipasi dan menempatkan diri dalam jaringan juga sudah cukup baik. Menurut hasil observasi di dalam kegiatan Musrenbang desa/kelurahan pada Januari 2014 dan 2015 untuk peserta dari kalangan pemuda sangat sedikit menurut dokumentasi pada daftar hadir di empat lokasi penelitian umumnya berjumlah delapan orang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan AsH (46 tahun) sebagai perangkat desa yang berperan sebagai ketua panitia Musrenbang Desa Rejasari, menyatakan generasi muda banyak yang meninggalkan desa untuk bekerja di daerah atau kota lain. Pengurus lembaga kemasyarakatan dari para "sesepuh" yang sudah lama mengabdikan di desa seperti petani, pedagang, dan pensiunan.

Partisipasi pemikiran yang berupa ide dari tokoh pemuda diharapkan lebih ditingkatkan lagi, yaitu dapat dilakukan dengan memberikan kesadaran bahwa sumbangan pemikiran dari tokoh pemuda biasanya akan melahirkan ide-ide yang baru dan lebih mewarnai dalam penyusunan perencanaan pembangunan di desa maupun kelurahan (Susanti, 2009). Menurut

Klausmeire dan Goodwin (dalam Purwatiningsih *et al.*, 2012) umur sebagai salah satu karakteristik penting yang terkait efisiensi dan efektifitas, sehingga pada usia produktif akan lebih mudah menerima perubahan, ide-ide dan inovasi yang

diharapkan dapat meningkatkan produktifitas. Gustina (2007) menyatakan semakin muda usia maka semakin banyak saluran komunikasi yang digunakan.

Tabel 1
Jumlah dan Persentase Stakeholder dalam Musrenbang Desa/Kelurahan di Kota Banjar Provinsi Jawa Barat Tahun 2014

Indikator	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
Usia	Muda (25 - 45 tahun)	42	31,58
	Tua (46 - 55 tahun)	-	
	Sangat Tua (≥ 56 tahun)	91	68,42
Pendidikan formal	Rendah (\leq SD - SMP)	119	89,47
	Menengah (SMA - Diploma)	-	
	Tinggi (\geq S1)	14	10,53
Pengalaman berorganisasi	Tidak berpengalaman ($\leq 1-2$ tahun)	45	33,83
	Berpengalaman (3 - ≥ 4 tahun)	88	66,17
Pengalaman Musrenbang	Tidak berpengalaman ($\leq 1-2$ tahun)	56	42,11
	Berpengalaman (3 - ≥ 4 tahun)	77	57,89
Motif mengikuti Musrenbang desa/kelurahan	Menggantikan orang lain	18	13,53
	Kepentingan masyarakat	67	50,38
	Kepentingan organisasi	48	36,09

Sumber: diolah dari kuesioner penelitian.

Tingkat pendidikan dapat menentukan kompetensi dari sumber daya manusia. Menurut Ma'rif *et al.*, (2010) karakteristik masyarakat yang masih rendah tingkat pendidikannya dan sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani sehingga usulan yang dihasilkan kurang berbobot. Keterlibatan masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi banyak yang tidak dapat menghadiri dalam pelaksanaan Musrenbang desa/kelurahan karena waktu penyelenggaraannya pada hari aktif kerja seperti PNS dan pegawai swasta serta pemerintah desa/kelurahan lebih memberikan kesempatan pada keterwakilan masyarakat yang banyak sebagai petani dan pedagang (wiraswasta). Hal tersebut dapat dilihat pada petikan hasil wawancara dengan informan.

Hasil wawancara dengan beberapa informan, di antaranya J (45 tahun) sebagai Sekretaris Desa Balokang menyatakan, kehadiran peserta Musrenbang desa lebih

banyak diwakili oleh *stakeholder* dari petani dan pedagang atau wiraswasta yang menjadi mata pencaharian paling banyak serta menjabat sebagai ketua RT, RW, dan dusun. Menurut A (38 tahun) sebagai panitia Musrenbang kelurahan Muktisari menyatakan; *stakeholder* yang menjadi pegawai negeri atau swasta memiliki waktu yang terbatas dan biasanya aspirasi disalurkan pada waktu Musrenbang di tingkat RT, RW, dan lingkungan yang waktunya lebih fleksibel seperti pada malam hari.

Berdasarkan hasil pengamatan langsung dalam Musrenbang desa/kelurahan Januari 2014 dan 2015 terdapat beberapa *stakeholder* yang mendominasi dalam proses musyawarah, hal ini dikarenakan *stakeholder* tersebut memiliki keberanian dan kemampuan berkomunikasi untuk mengeluarkan aspirasi (pendapat), menjelaskan, menolak usulan, serta berdebat, kemudian memiliki pengalaman berorganisasi dan mengikuti

Musrenbang desa/kelurahan. Indrajat *et al.*, (2012) menyatakan Musrenbang masih bersifat formalitas tahunan, adanya dominasi dari beberapa *stakeholder* dan belum efektifnya pencapaian program yang dihasilkan.

Menurut Lubis (2007) komunikasi menuju komunitas pembelajar sebagai masyarakat yang komunikatif untuk berdialog sama rata, dan komunikasi (konvergensi) bukan “memenangkan argumentasi” tetapi untuk menumbuhkan dan mengembangkan pengertian. Purwatiningsih (2012) menyatakan komunikasi akan berhasil dengan baik apabila pesan yang disampaikan sesuai dengan pengetahuan dan lingkup pengalaman komunikan.

Aspirasi Stakeholder dalam Musrenbang Desa/Kelurahan

Stakeholder membawa aspirasi pada Musrenbang desa/kelurahan untuk diusulkan, dimusyawarahkan, menyusun urutan prioritas dan menyepakati yang bersumber dari hasil Musrenbang di tingkat dusun/lingkungan yaitu pada proses musyawarah kelompok empat bidang pembangunan yaitu: (1) Bidang pemerintahan seperti pelatihan peningkatan kapasitas dan kompetensi untuk melakukan pelayanan masyarakat, kemampuan administrasi dan keuangan dari para aparatur lembaga masyarakat mulai RT, RW, dan dusun/lingkungan serta kesejahteraannya; (2) Bidang sosial budaya seperti peningkatan kesadaran dan budaya bersih lingkungan dan kesehatan anak serta keluarga, pendidikan anak, keterampilan ibu rumah tangga, kegiatan keagamaan (kerohanian), dan pelestarian seni serta budaya lokal; (3) Bidang ekonomi seperti peningkatan kemampuan (keahlian), pendampingan, dan kemitraan untuk usaha kecil dan menengah, pertanian, perkebunan dan perikanan; (4) Bidang infrastruktur yaitu pengaspalan dan perbaikan jalan, pembuatan dan perbaikan jembatan, saluran air, dan gedung sebagai fasilitas umum.

Pada tabel 2 ditampilkan aspirasi yang diusulkan *stakeholder* pada Musrenbang desa/kelurahan di 4 (empat) lokasi penelitian.

Proses musyawarah tersebut merupakan model komunikasi konvergensi, sebagaimana menurut Rogers dan Kincaid (1981) ketika informasi dibagikan oleh dua atau lebih partisipan, proses informasi membawa pada pemahaman bersama (timbang balik), kesepakatan bersama, dan tindakan kolektif.

Aspirasi yang dibawa *stakeholder* di Musrenbang desa/kelurahan, merupakan proses dan hasil komunikasi melalui lobi secara informal dan telah dinegosiasikan serta disepakati. Orzeață, (2013) menyatakan sebagian besar orang berkomunikasi secara langsung baik lisan maupun tertulis, karena jenis komunikasi tersebut memberi mereka kesempatan untuk secara eksplisit menyampaikan pesan tentang tujuan dan kepentingan, serta cara-cara dan sarana yang mereka anjurkan dalam kompetisi atau negosiasi dengan pihak ketiga. *Stakeholder* sebagai peserta Musrenbang dusun lingkungan berasal dari berbagai unsur dalam masyarakat sebagai perwakilan organisasi masyarakat dan tokoh masyarakat, tetapi organisasi kemasyarakatan yang berasal dari ketua atau pengurus RT, RW, dan dusun/lingkungan serta tokoh masyarakat yang umumnya lebih banyak utusannya memiliki kepentingan untuk memerjuangkan aspirasi daerahnya daripada organisasi masyarakat yang utusannya umumnya lebih sedikit. Maka aspirasi berdasarkan kepentingan masyarakat dinilai lebih penting dibandingkan aspirasi dari kepentingan organisasi dan adanya penolakan pada aspirasi dianggap memihak kelompok tertentu serta aspirasi berdasarkan kepentingan pribadi sebagai aspirasi yang tidak penting. Menurut Sufianti *et al.* (2013) dalam proses perencanaan terdapat upaya untuk memecahkan permasalahan secara bersama, melalui suatu proses pembelajaran diantara para *stakeholder*. Proses interaksi, diskusi dan akomodasi aspirasi berkaitan dengan kepentingan, masalah dan strategi yang akan dilakukan.

Aspirasi berdasarkan program pembangunan yang belum terlaksanakan dan berdasarkan anggaran yang tersedia dinilai

Tabel 2
Jumlah dan Persentase Aspirasi Stakeholder dalam Musrenbang Desa/Kelurahan di Kota Banjar Provinsi Jawa Barat Tahun 2014

Aspirasi yang diusulkan	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
Berdasarkan aspirasi pribadi	Tidak Penting	86	64,66
	Penting	47	35,34
Berdasarkan program pembangunan yang belum terlaksanakan	Tidak Penting	71	53,38
	Penting	62	46,62
Berdasarkan kepentingan masyarakat	Tidak Penting	14	10,53
	Penting	119	89,47
Berdasarkan hasil Musrenbang dusun/lingkungan	Tidak Penting	7	05,26
	Penting	126	94,74
Besaran anggaran yang tersedia	Tidak Penting	78	58,65
	Penting	55	41,35
Berdasarkan kepentingan organisasi	Tidak Penting	58	43,61
	Penting	75	56,39
Menolak aspirasi yang berpihak pada kelompok tertentu	Tidak Penting	46	34,59
	Penting	87	65,41

Sumber: Hasil pengolahan kuesioner.

sebagai aspirasi yang tidak penting, hal ini karena: (1) Aspirasi yang diusulkan selama ini umumnya dapat direalisasikan; (2) Aspirasi diusulkan semaksimal mungkin tanpa melihat besar anggaran, supaya jika ada penolakan masih terdapat program yang direalisasikan; (3) Aspirasi yang belum dilaksanakan, umumnya tidak diusulkan kembali dan fokus pada usulan yang baru, dikarenakan usulan program pembangunan tidak disetujui dan tidak sesuai dengan program rencana kota dan provinsi. Termasuk besaran anggaran yang diusulkan, akan disesuaikan dan ditentukan oleh APBD kota dan provinsi.

Aspirasi yang diperjuangkan *stakeholder* sampai pada hasil kesepakatan bersama dari proses musyawarah, dan adanya harapan bersama untuk mengusulkan kembali program yang tertunda pada tahun berikutnya secara berkesinambungan. Ini merupakan model komunikasi konvergensi, menurut Rogers dan Kincaid (1981) ada empat kemungkinan kombinasi dari pemahaman bersama (timbang balik) dan kesepakatan bersama yaitu: (1) Pemahaman timbal balik dengan kesepakatan; (2) Pemahaman timbal balik dengan ketidaksepakatan; (3) Kesalahpahaman timbal balik dengan kesepakatan; (4) Kesalahpahaman timbal balik dengan ketidaksepakatan.

Berdasarkan pengamatan pada Musrenbang desa/kelurahan bulan Januari tahun 2014 dan 2015, kegiatan musyawarah kelompok bidang fisik lebih lama waktu pelaksanaannya, lebih dinamis, dialogis, dan terjadi perdebatan serta keterlibatan *stakeholder* dari perempuan tidak ada. Hasil analisis dokumen dari program pembangunan yang dihasilkan Musrenbang desa/kelurahan 2014/2015 umumnya masih dominan program infrastruktur, termasuk pada program pemerintahan serta sosial budaya juga masih banyak usulan tentang pengadaan peralatan dan sarana operasional, dan pengadaan atau rehabilitasi ruangan yang bersifat fisik/material. Kecuali pada program ekonomi terdapat usulan tentang pengadaan, bantuan dan pemberdayaan bidang pertanian, peternakan, dan perikanan, akan tetapi dari segi jumlah pembiayaan anggaran masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan bidang infrastruktur.

Akses Media Informasi

Media informasi menurut Leeuwis (2009) adalah alat yang membantu menggabungkan saluran komunikasi yang berbeda yaitu: (1) Media massa konvensional seperti jurnal, brosur, buku, manual; (2) Media interpersonal seperti diskusi, pertemuan kelompok; (3) Media teknologi informasi seperti internet. Akses media

informasi dari *stakeholder* disajikan pada tabel 3.

Untuk mengetahui informasi tentang Musrenbang, *stakeholder* mengakses beberapa media informasi. Tabel 3 menunjukkan *stakeholder* memiliki intensitas tinggi dalam mengakses media informasi surat resmi dari pemerintah desa/kelurahan sebelum kegiatan Musrenbang desa/kelurahan dan pada pelaksanaan hasil. Intensitas mengakses media informasi yang masuk kategori rendah yaitu mengakses papan pengumuman di kantor desa/kelurahan, spanduk dan baliho di tempat umum, koran dan radio lokal, serta *website* Bappeda. Hal ini terjadi karena media papan pengumuman di kantor desa/kelurahan tidak dipergunakan untuk menginformasikan tentang Musrenbang. Media spanduk dan baliho tidak terpasang di tempat umum yang dapat dilihat oleh masyarakat, spanduk hanya dipergunakan sebagai dekorasi ruangan kegiatan Musrenbang. Radio dan koran lokal tidak dimanfaatkan dan tidak lagi sebagai sumber informasi utama, serta *website* Bappeda dapat diakses oleh kalangan terbatas yang mengerti dan mampu mengakses internet.

Media radio dan koran lokal tidak lagi menjadi media yang dipergunakan untuk mencari informasi, dan umumnya *stakeholder* masih terbatas kemampuannya mengakses media *website* Bappeda. Masyarakat memiliki keterbatasan dalam memiliki dan mengakses media lainnya seperti radio dan surat kabar. Media radio lokal dan surat kabar dinilai kurang efektif dan penting, sehingga tidak dimanfaatkan oleh pemerintah desa yang dampaknya hanya seketika atau cukup singkat, dan khalayak sudah jarang mengakses media radio. Media radio lokal tidak aktif melakukan peliputan pemberitaan, kecuali media surat kabar lokal pernah melakukan peliputan tentang proses dan hasil Musrenbang tetapi tidak intensif. Effendy (2005) menjelaskan bahwa media massa dalam perkembangannya dianggap tidak tepat lagi karena proses komunikasi dianggap tidak menyeluruh. Para cendekiawan menunjukkan gejala sosial yang diakibatkan media massa

tidak hanya berlangsung satu tahap (*one-step flow communication*), tetapi dua tahap (*two-step flow communication*) dan multi-tahap (*multistep flow communication*) sebagaimana kecenderungan di daerah dan di perdesaan yang merupakan wilayah dari peranan para pemuka pendapat. Dalam era Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), *website* Bappeda dapat mempermudah dalam mencari informasi, mengajukan data usulan, mengontrol, dan mengevaluasi hasil Musrenbang. Media komunikasi massa termasuk pada dunia maya (*cyberspace*) dan saluran komunikasi tradisional lainnya, memainkan peran penting dalam menciptakan kesadaran ilmu pengetahuan dan teknologi (melalui penyebaran fakta, data, gambar) dalam bentuk apapun oleh media diinformasikan kepada khalayak, hal ini masih terdapat masalah dan tantangan (Batta *et al.*, 2014).

Media informasi yang dapat dimanfaatkan dalam Musrenbang melalui strategi e-Gov dapat menciptakan: (1) Partisipasi masyarakat, artinya masyarakat dapat terlibat secara aktif salah satunya melalui fungsi media informasi yang sangat penting untuk memberikan ruang aspirasi dan mencerdaskan masyarakat untuk mengetahui persoalan, agenda pembangunan, mengontrol atau mengawasi, dan mengevaluasi proses pembangunan; (2) Transparansi, yaitu adanya keterbukaan informasi kepada publik melalui media informasi baik program pembangunan yang direncanakan, dilaksanakan, dan besarnya anggaran yang direalisasikan, sehingga masyarakat dapat mengetahui, mengontrol dan mengevaluasinya; (3) Akuntabilitas, artinya mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik melalui media informasi.

Strategi dalam Mendukung Kegiatan Musrenbang Desa/Kelurahan

Berdasarkan deskripsi realitas karakteristik, aspirasi dan akses media informasi yang diakses *stakeholder* dalam proses dan pelaksanaan hasil Musrenbang desa/kelurahan dengan menggunakan analisis

interaktif, maka dapat dibuat strategi Musrenbang desa/kelurahan dengan menggunakan analisis SWOT yaitu: (1) Faktor internal yang terdiri dari *Strenght* (kekuatan) dan *Weakness* (kelemahan). (2) Faktor eksternal terdiri dari *Opportunities* (peluang) dan *Threats* (ancaman) (Rangkuti,

2004; Adisasmita, 2006). Menurut Effendy (2008) strategi merupakan perencanaan dan manajemen untuk mencapai tujuan dengan teknik operasionalnya supaya dimengerti, diterima dan ada motivasi untuk melakukan.

Tabel 3
Jumlah dan Persentase Intensitas Mengakses Media informasi tentang Musrenbang Desa/Kelurahan

Parameter	Kategori	Sebelum Musrenbang	
		Jumlah	Persentase (%)
Mendapat informasi dari surat resmi desa/kelurahan	Rendah	26	19,55
	Tinggi	107	80,45
Mendapat informasi Musrenbang dari papan pengumuman di kantor desa/kelurahan	Rendah	86	72,18
	Tinggi	37	27,90
Mendapat informasi Musrenbang dari spanduk dan baliho di tempat umum	Rendah	127	95,49
	Tinggi	6	04,51
Mendapat informasi Musrenbang dari radio lokal	Rendah	114	85,71
	Tinggi	19	14,29
Mendapat informasi Musrenbang dari koran lokal	Rendah	109	81,95
	Tinggi	24	18,05
Mendapat informasi Musrenbang dari website Bappeda	Rendah	92	69,17
	Tinggi	41	30,83

Sumber: Hasil pengolahan kuesioner.

Tabel 4
Analisis SWOT dan Strategi dalam mendukung Musrenbang Desa/Kelurahan

Faktor Internal	Strength (S)	Weakness (W)
	<ol style="list-style-type: none"> Musrenbang untuk mengambil keputusan bersama secara dialogis, demokratis dan terbuka dalam bentuk kegiatan rembug masyarakat di tingkat RT, RW, dan dusun untuk membahas permasalahan dan solusi, rencana, dan pelaksanaan serta pemilihan pengurus sudah lama dan menjadi budaya masyarakat Terdapat 16 desa yang memiliki anggaran besar dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang otonom untuk mengurus pembangunan secara sendiri yang tersedia cukup besar untuk diwujudkan dalam bentuk program pembangunan khususnya dana swadaya dan pendapatan asli desa. Pemerintah kelurahan dapat mengajukan program dan anggaran ke APBD Kota Banjar dan Provinsi untuk melaksanakan pembangunan di 9 kelurahan di Kota Banjar. Desa dan kelurahan memiliki otonomi dengan kewenangan 	<ol style="list-style-type: none"> Pemangku kepentingan sebagai peserta Musrenbang desa/kelurahan umumnya keterwakilan perempuan dan generasi muda masih sedikit. Pemangku kepentingan termasuk fasilitator sebagai utusan/delegasi masyarakat masih didominasi pihak tertentu yang menjadi pendukung elit desa dan pemerintahan kota. Aspirasi dan hasilnya berupa program pembangunan masih banyak berorientasi dan alokasi pendanaannya pada bidang material/fisik seperti pengadaan barang dan peralatan serta pembangunan pada infrastruktur jalan, jembatan, dan gedung. Bidang pembangunan sosial budaya dan ekonomi masih sedikit serta pelaksanaannya prosedural. Kurang memanfaatkan media

	<p>untuk mengurus proses pembangunan baik dari segi anggaran maupun kebijakan yang ditetapkan</p>	<p>informasi, tidak ada keterbukaan informasi dan akuntabilitas pada publik, kurang ada kemauan dan kemampuan mengakses media informasi terutama <i>website</i> Bappeda.</p>
<p>Faktor Eksternal</p> <p>Opportunity (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesempatan terbuka untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan partisipatif dengan pelaksanaan Musrenbang tingkat RW dan dusun/lingkungan dan desa/kelurahan. 2. Anggaran pembangunan akan semakin besar dengan berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. 3. Perkembangan media informasi yang semakin mudah dan murah untuk mendukung kegiatan Musrenbang dan menciptakan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik. 	<p>Strategi SO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bappeda menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di tingkat desa/kelurahan tentang mekanisme pelaksanaan Musrenbang desa/kelurahan, analisis dan pembuatan rencana program pembangunan, pelaporan, serta evaluasi pelaksanaan program pembangunan sebagai hasil Musrenbang desa/kelurahan. Kegiatan tersebut sebagai respon dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang lebih besar setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (S1, S2, S3-O1, O2). 2. Pemerintah desa/kelurahan dapat lebih memanfaatkan media informasi seperti menambah papan pengumuman di kantor desa/kelurahan dan baliho di tempat umum supaya diketahui publik (S2, S3 – O2, O3). 	<p>Strategi WO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah desa/kelurahan memiliki kebijakan menentukan jumlah kuota (perwakilan) bagi keterlibatan perempuan dan generasi muda (W1, O1) 2. Bappeda menyelenggarakan kegiatan pelatihan untuk pemangku kepentingan dan fasilitator untuk meningkatkan kesadaran motivasi, kemampuan membuat rencana program, pelaksanaan pelaporan, dan evaluasi hasil (W1, W2 – O1, O2). 3. Melakukan riset untuk identifikasi dan analisis masalah serta potensi di desa/kelurahan supaya usulan perencanaan dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat (W3, O1, O2). 4. Bappeda, pemerintah desa/kelurahan dan pemangku kepentingan lebih memanfaatkan beragam media informasi untuk partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas pada publik (W4, O2, O3).
<p>Threats (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kuatnya kewenangan pemerintah kota (Bappeda) menentukan alokasi dan program pembangunan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga pembangunan yang bersumber dari APBD kota dan provinsi masih bersifat teknokratik. 2. Fasilitator ditunjuk oleh Bappeda tetapi kurang maksimal dalam Musrenbang. 3. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kurang aktif memberikan informasi data penting tentang RKPD dalam Musrenbang desa/kelurahan, karena kehadirannya masih bersifat formalitas sebagai perwakilan dinas pemerintah. 4. Komunitas wartawan/media 	<p>Strategi ST</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan yang diselenggarakan Bappeda dalam rangka peningkatan kemampuan masyarakat dan pemangku kepentingan tersebut dapat melibatkan perguruan tinggi sebagai pihak yang netral/independen untuk menjaga objektivitas kegiatan (S1, S2, S3, T1). 2. Seleksi terbuka bagi fasilitator Musrenbang desa/kelurahan dengan kualifikasi pendidikan, pengalaman, dan pengabdian (S1, S2, T2). 3. OPD sebagai utusan dinas pemerintah diberikan tugas khusus untuk memberikan informasi penting tentang RKPD Kota Banjar yang 	<p>Strategi WT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bappeda, pemerintah desa dan kelurahan memberikan alokasi dana yang lebih besar untuk pemberdayaan perempuan dan generasi muda (W1, T1). 2. Bappeda menyelenggarakan pelatihan kemampuan aparatur termasuk perangkat desa/kelurahan, pemangku kepentingan, dan fasilitator serta OPD supaya dapat menghasilkan program pembangunan yang lebih berkualitas dan partisipatif, implemenatif, dan bersinergi dengan program pembangunan pemerintah Kota Banjar yang bersumber dari RKPD

lokal dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) masih ada yang berorientasi proyek dan tidak konsisten melakukan kontrol secara objektif dan konstruktif

bermanfaat bagi program dalam kegiatan Musrenbang desa/kelurahan (S1, S2, T3).
4. Menertibkan komunitas wartawan lokal dan LSM dengan mengimplementasikan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (S2, S3, T4).

(W2, W3, T1, T2, T3).
3. Bappeda menyelenggarakan sosialisasi kepada perangkat desa/kelurahan dan pemangku kepentingan tentang literasi media yaitu kebebasan pers, kode etik, jurnalistik, dan pemanfaatan media, serta kemampuan mengakses *website* Kota Banjar (W4, T4).

Berdasarkan hasil penelitian tahap pertama yaitu studi pendahuluan, tahap kedua menggunakan metode kuantitatif deskriptif dan tahap ketiga menggunakan metode kualitatif dengan triangulasi, dapat dikaji dengan analisis SWOT seperti ditunjukkan tabel 4.

PENUTUP

Simpulan

Identitas *stakeholder* sebagai peserta Musrenbang desa/kelurahan di Kota Banjar Provinsi Jawa Barat umumnya dari laki-laki, profesi petani dan pedagang. Karakteristik *stakeholder* umumnya dari usia tua, pendidikan rendah (\leq SD - SMP), memiliki pengalaman berorganisasi dan mengikuti Musrenbang desa/kelurahan serta motif yang kuat mengikuti Musrenbang desa/kelurahan untuk kepentingan masyarakat dan organisasi. Masih terdapat dominasi dari beberapa *stakeholder* yang memiliki keberanian dan kemampuan berkomunikasi dalam proses musyawarah untuk beraspirasi, menolak, dan berdebat. Fasilitator masih ada yang kurang aktif berperan untuk memotivasi, memberikan informasi penting dan mengakomodasi aspirasi dalam Musrenbang desa/kelurahan.

Aspirasi *stakeholder* yang memiliki kategori penting adalah aspirasi yang berdasarkan hasil Musrenbang dusun/lingkungan, kepentingan masyarakat, menolak aspirasi yang berpihak pada kelompok tertentu dan aspirasi berdasarkan

kepentingan organisasi. Aspirasi yang dihasilkan *stakeholder* yang memiliki kategori sesuai adalah aspirasi dari hasil Musrenbang dusun/lingkungan, usulan masyarakat, program pembangunan yang diprioritaskan dan usulan organisasi. Aspirasi *stakeholder* yang diusulkan dan dihasilkan masih dominan pada bidang fisik/infrastruktur, termasuk bidang lainnya seperti bidang pemerintah, sosial budaya dan ekonomi masih berorientasi pada material pengadaan barang, peralatan dan bantuan dibandingkan dengan program pemberdayaan masyarakat dan ekonomi serta pembangunan sumber daya manusia.

Aspirasi yang diusulkan dan disetujui pada bidang sosial budaya dan ekonomi dalam realisasinya masih bersifat prosedural dengan menunggu informasi yang lama dan mendadak serta harus membuat lagi proposal pengajuan ke dinas pemerintah Kota Banjar.

Intensitas *stakeholder* mengakses media informasi yang memiliki kategori tinggi yaitu mengakses media dari surat resmi pemerintah desa/kelurahan baik sebelum dan ketika pelaksanaan hasil Musrenbang desa/kelurahan. Media informasi lainnya seperti papan pengumuman di kantor desa/kelurahan, spanduk dan baliho di area publik, koran dan radio lokal serta *website* Bappeda Kota Banjar tidak dimanfaatkan oleh pemerintah dalam proses dan pelaksanaan hasil Musrenbang desa/kelurahan, sehingga intensitas *stakeholder* mengakses media informasi tersebut masuk kategori rendah.

Saran

Pihak pemerintah desa/kelurahan memberikan kesempatan lebih terbuka dalam menentukan jumlah *stakeholder* dari perempuan dan generasi muda sebagai peserta Musrenbang desa/kelurahan.

Aspirasi *stakeholder* lebih berorientasi pada program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sumber daya manusia untuk meningkatkan pengetahuan serta kemampuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2006). *Membangun desa partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Age, A. I., Obinne, C. P. O. and Demenongu, T. S. (2012). Communication for Sustainable Rural and Agricultural Development in Benue State, Nigeria. *Sustainable Agriculture Research*, 1 (1), p.118–129. [Online]. Available at: doi:10.5539/sar.v1n1p118.
- Batta, H., Ashong, C. and Obot, C. (2014). Science, Nano-Science and Nano-Technology Content in Nigeria's Elite and Popular Press: Focus on Framing and Socio-political Involvement. *New Media and Mass Communication*, 31 (0), p.9–19. [Online]. Available at: doi:10.7176/NMMC.VOL319-19.
- Buddenhagen, R. W. and Baldwin, J. R. (2012). Performing communicative functions in development projects: An exploratory study of development practices in Tanzania. *International Journal of Intercultural Relations*, 36 (3), p.418–429. [Online]. Available at: doi:10.1016/j.ijintrel.2011.11.001.
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 3rd ed. SAGE publications.
- Effendy, O. U. (2005). *Ilmu Komunikasi Suatu Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Effendy, O. U. (2008). *Dinamika komunikasi*. Remaja Rosdakarya.
- Gustina, A. (2007). *Jaringan Komunikasi Dan Peran Perempuan Dalam Mempertahankan Budaya Barat (Studi Kasus Masyarakat Desa Negeri Katon, Kecamatan Negeri Katon, Lampung Selatan)*. Institut Pertanian Bogor. [Online]. Available at: <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/41414>.
- Indrajat, H., Budihardjo, B., Hadi, I. and Budiono, P. (2012). Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan di Kecamatan Kemiling. In: *Seminar Hasil-Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat- Dies Natalis FISIP Unila Tahun 2012*, 2012, p.32–45. [Online]. Available at: <http://publikasi.fisip.unila.ac.id/index.php/roseme/article/view/4>.
- Iqbal, M. (2007). Analisis Peran Pemangku Kepentingan dan Implementasinya Dalam Pembangunan Pertanian. *Jurnal Litbang Pertanian*, 26 (3), p.89–99. [Online]. Available at: <http://pustaka.litbang.pertanian.go.id/publikasi/p3263071.pdf>.
- Kaelola, A. (2009). *Kamus istilah politik kontemporer*. Yogyakarta: Cakrawala.
- Koswara, A. (2010). *The Alignment Strategy of APBD Planning with RPJMD to Improve Infrastructure Development in Bekasi City*. Institut Pertanian Bogor. [Online]. Available at: <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/56809>.
- Leeuwis, C. (2009). *Komunikasi untuk Inovasi Pedesaan: Berpikir Kembali tentang Penyuluhan Pertanian (dengan kontribusi dari Anne van den Ban)*. Kanisius.
- Lubis, D. (2007). Komunikasi Menuju Komunitas Pembelajar. In: Adiwibowo, S. (ed.), *Ekologi Manusia*, Bogor: FEM IPB.
- Ma'rif, S., Nugroho, P. and Wijayanti, L. (2010). Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kota Semarang. *Riptek*, 4 (11), p.53–62. [Online]. Available at: [http://bappeda.semarangkota.go.id/uploaded/publikasi/Evaluasi_Efektivitas_Pelaksanaan_Musyawarah_Perencanaan_Pembangunan_\(Musrenbang\)_Kota_Semarang_-_SAMSUL_M_dkk.pdf](http://bappeda.semarangkota.go.id/uploaded/publikasi/Evaluasi_Efektivitas_Pelaksanaan_Musyawarah_Perencanaan_Pembangunan_(Musrenbang)_Kota_Semarang_-_SAMSUL_M_dkk.pdf).
- Mardikanto, T. (2010). *Komunikasi Pembangunan: Acuan Bagi Akademisi, Praktisi, dan Peminat Komunikasi Pembangunan*. Sebelas Maret University Press.
- Mascarenhas, A., Ramos, T. B. and Nunes, L. (2012). Developing an integrated approach for the strategic monitoring of regional spatial plans. *Land Use Policy*, 29 (3),

- p.641–651. [Online]. Available at: doi:10.1016/j.landusepol.2011.10.006.
- Miles, M. B. and Huberman, A. M. (2007). *Analisis Data Kualitatif (pen. Tjetjep Rohendi Rohidi)*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Muchlis, F. (2009). *Analisis komunikasi partisipatif dalam program pemberdayaan masyarakat (studi kasus pada implementasi musyawarah dalam PNPB mandiri perdesaan di desa Teluk kecamatan Pemayang Kabupaten Batang Hari)*. Institut Pertanian Bogor. [Online]. Available at: <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/4409>.
- Mulyana, D. (2007). Membangun Komunikasi Pembangunan yang Humanistik. In: Dilla, S. (ed.), *Komunikasi Pembangunan: Pendekatan Terpadu*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Ndraha, T. (2011). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Nurcholis, H. and Herfan, D. (2009). *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah*. Grasindo.
- Orzeșă, M. (2013). Defective Communication and The Lack of Communication – Main Causes of Security Crises Between Communities Belonging to Different Cultures. *International Journal of Communication Research*, 3 (2), p.100–109.
- Purwaningsih, E. (2008). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. *Jantra*, 3 (6), p.443–452.
- Purwatiningsih, S. D. (2013). *Effectiveness of Communications Development in Conservation Communities round the National Park of Mt. Halimun Salak*. IPB (Bogor Agricultural University).
- Rangkuti, F. (2004). *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis: Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Mencapai Abad 21*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rogers, E. M. (1985). *Komunikasi dan Pembangunan; Perspektif Kritis (pen. Dasman Nurdin)*. Jakarta: LP3ES.
- Rogers, E. M. and Kincaid, D. L. (1981). *Communication networks: toward a new paradigm for research*. New York Free Press 1981.
- Salahuddin. (2012). Pengaruh komunikasi interaksional terhadap partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kota Kendari. *Jurnal Stimuli Ilmu Komunikasi*, 3, p.70–78.
- Satries, W. I. (2011). Mengukur Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Bekasi Dalam Penyusunan APBD Melalui Pelaksanaan Musrenbang 2010. *Kybernan*, 2 (2), p.89–130. [Online]. Available at: <http://www.ejournal-unisma.net/ojs/index.php/kybernan/article/view/356>.
- Schmeer, K. (1999). *Guidelines for Conducting a Stakeholder Analysis*. Bethesda, MD: Partnerships for Health Reform, Abt Associates Inc.
- Sufianti, E., Sawitri, D., Pribadi, K. N. and Firman, T. (2013). Collaborative Process In Communicative-Based Planning Within Uncollaborative Society. *MIMBAR, The Journal of Social and Development*, 29 (2), p.133–144. [Online]. Available at: <http://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/390>.
- Sumarto, H. S. (2004). *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Supardi, U. S. (2013). *Aplikasi Statistika dalam Penelitian Konsep Statistika yang Lebih Komprehensif*. Jakarta: Change Publication.
- Susanti. (2009). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 6 (3).
- Susanto, D. (2010). Strategi Peningkatan Kapasitas Modal Sosial dan Kualitas Sumberdaya Manusia Pendamping Pengembangan Masyarakat. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 08 (1), p.77–89.
- Taddlie, C. and Tashakkori, A. (2010). *Problematika dan Kontroversi Utama Seputar Penggunaan Metode Campuran dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Prilaku (pen. Daryatno)*.